



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep

Ristiana Ristiana ✉, Amin Yusuf

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang

DOI: <https://doi.org/10.15294/pls.v4i1.31319>

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 2020
Disetujui April 2020
Dipublikasikan Juni 2020

Keywords:

*Empowerment; BUMDES;
tourism village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses pemberdayaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDES di Desa Wisata Lerep. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 2 pengelola BUMDES sebagai informan kunci, 4 anggota BUMDES sebagai informan tambahan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan ada 7 tahap yaitu: tahap persiapan, pengkajian perencanaan alternatif program atau kegiatan, performalisasi rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi; faktor pendorong pemberdayaan adalah sumber daya alam yang melimpah, dukungan dari masyarakat dan pemerintah, serta niat dan semangat dari individu yang diberdayakan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah minimnya sumber daya manusia yang faham dengan BUMDES, anggaran dana yang masih minim, dan kurang percayanya masyarakat arti penting BUMDES.

Abstract

The purpose of this research is to describe the empowerment process and supporting factors and inhibiting factors in the economic empowerment of the community through BUMDES in Lerep Tourism Village. This study uses a descriptive qualitative approach, the method of data collection uses interviews, observation and documentation. The research subjects consisted of 2 BUMDES managers as key informants, 4 BUMDES members as additional informants. The data validity technique uses source triangulation and methods. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results of the study show that the empowerment process has 7 stages, namely: the preparation stage, the assessment of alternative planning programs or activities, the performalization of the action plan, the implementation of programs or activities, evaluation and termination; the drivers of empowerment are abundant natural resources, support from the community and the government, as well as the intentions and enthusiasm of empowered individuals. While the inhibiting factor is the lack of human resources who understand the BUMDES, the budget is still minimal, and the community lacks confidence in the importance of the BUMDES.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama yang berkaitan mengenai kesejahteraan umum dimana hal tersebut telah menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berbagai upaya program pemberdayaan ekonomi sudah diterapkan oleh pemerintah mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra), Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra), Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan yang lainnya namun belum membuahkan hasil. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulistyowati (2004:4) yang menyatakan bahwa: “Banyak program pengentasan kemiskinan hanya terfokus pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, bukan mencari jalan keluar untuk meringankan beban kemiskinan dengan melalui usaha peningkatan kemampuan secara bertahap”. Selain itu juga masih besarnya peran pemerintah dalam perekonomian masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak berkembang secara mandiri. Hal ini menjadi beberapa alasan mengapa pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam jurnal internasional pemberdayaan adalah:

“The concept of empowerment has been developed and employed in a wide array of definitions in social-science research. Zimmerman (1995) distinguishes between empowering process and empowered outcomes. The first refers to how people, organizations, and communities become empowered, and the latter refers to the consequences of those processes. The concept of empowerment is applicable for those who lack power of those whose potential is not fully developed in improving the quality-of-life, including urban poor. This concept

encourages the poor to reacquire the power and control over their own lives (Friedmann, 1992).

Dapat diartikan sebagai berikut: konsep pemberdayaan telah dikembangkan dan digunakan dalam berbagai definisi dalam penelitian sosial sains. Zimmerman (1995) membedakan antara proses pemberdayaan dan hasil pemberdayaan. Pertama merujuk kepada bagaimana orang-orang, organisasi, dan masyarakat menjadi berdaya, dan yang terakhir mengacu pada konsekuensi dari proses-proses tersebut. Konsep pemberdayaan berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau mereka yang potensial belum sepenuhnya dikembangkan dalam meningkatkan kualitas dalam kehidupan, termasuk perkotaan yang miskin. Konsep ini mendorong masyarakat untuk kekuasaan dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Friedmann, 1992).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat. Dimana, sistem perekonomian dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu, hal ini diterapkan untuk menjadikan masyarakat menjadi mandiri, kreatif, dan memiliki semangat usaha yang tinggi tidak hanya bergantung pada modal yang diberikan. Karena, tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah membangun dan meningkatkan kemampuan, kemandirian, kekuasaan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya mereka. Pemberdayaan merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat (Anwas, 2013:48). Selain adanya kemandirian usaha dalam hasil penyelenggaraan pemberdayaan, peningkatan penghasilan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekunder dan tersier (Qodriyati dan Fakhruddin, 2016:46).

Untuk melakukan suatu pemberdayaan, selain terdapat tujuan yang akan dicapai juga terdapat strategi-strategi dan prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Adanya 2 hal tersebut

yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan agar tujuan yang diharapkan tercapai. Berdasarkan hasil penelitian Desmawati, dkk. (2015) didapatkan tiga strategi pemberdayaan masyarakat. Adapun ketiga strategi pemberdayaan masyarakat tersebut adalah apabila Supply lebih kecil dari Demand, kemudian Supply sama dengan Demand, Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi Demand, dan Supply tidak sama dengan atau lebih tinggi Demand. Adapun perbedaan yang paling esensial terletak pada tingkat pelaksanaan, yaitu pertama; demand lebih kecil dari supply dalam pelaksanaan pelatihan dimulai dari dasar yang membutuhkan waktu selama 6 bulan. Kedua, demand sama dengan supply dalam pelaksanaan pelatihan langsung dimulai dari pengembangan skills kewirausahaan. Ketiga, demand tidak sama dengan supply atau lebih tinggi dari supply dimulai dari peningkatan usaha atau mencari alternatif pengembangan di luar daerah penelitian.

Menurut Guitierrez dalam Jurnal internasional yang mengatakan strategi pemberdayaan dilakukan ada beberapa tingkat yang harus dilaksanakan yaitu:

“argues that there are three perspectives on empowerment. First, a macro level perspectives defines empowerment as the process of increasing collective political power. Secound, a micro level perspective defines empowerment as development of an individual felling of inscreased power or control without an actual change in secound structural arragement. Third, an approachment combining the first and secound perspectives: how individual empowerment can contribute to group empowerment and how the increase in a group’ power and enchance the fuctioning of this individual number” (Guitierrez, 2010:210).

Artinya: Ada tiga perspektif pemberdayaan. Pertama, tingkat makro mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kekuatan politik kolektif. Kedua, perspektif tingkat makro mendefinisikan pemberdayaan sebagai pengembangan perasaan individu daya yang meningkat atau kontrol tanpa perubahan yang sebenarnya dalam pengaturan

struktural. Ketiga, pendekatan yang menggabungkan perspektif pertama dan kedua: “bagaimana pemberdayaan individu dapat berkontribusi untuk pemberdayaan kelompok dan bagaimana peningkatan kekuatan kelompok dapat meningkatkan fungsi anggota individu”.

Selain strategi dan prinsip, perlu juga adanya pendekatan yang digunakan dalam melakukan sebuah pemberdayaan. Pendekatan dilakukan untuk mempermudah dalam program tentang apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk menyusun rencana. Menurut penelitian Jurnal internasional yang dikemukakan oleh Reid (dalam Ani. dkk 2017:506-508) sebagai berikut:

suggested few steps and processes for implementing empowerment approach in community development in which must be done in sequence. The steps are as follows: a) Building Hope, b) Widespread Participation, c) Building Relationship with Partners, d) Creating Visions, e) Establishing Work Plan, f) Finding Resources, g) Creating Success, h) Developing Community Capacity, i).Adapting Strategy Plan, and j) Development Towards Sustainability.

Artinya: Ada beberapa langkah dan proses untuk menerapkan pendekatan pemberdayaan dalam pengembangan masyarakat yang harus dilakukan secara berurutan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a) Membangun harapan, b) partisipasi luas, c) membangun hubungan dengan mitra, d) menciptakan visi, e)menetapkan rencana kerja, f) mencari sumber daya, g) menciptakan sukses, h) mengembangkan kapasitas masyarakat, i) rencana strategi, dan j) pengembangan menuju keberlanjutan.

Haris (2014:60) menyebutkan bahwa untuk memahami lebih rinci pendekatan yang di gunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat maka pendekatan yang di pakai dapat di kategorikan ke dalam beberapa tipe misalnya: Pertama, pendekatan komunitas. Kedua, pendekatan umum. Ketiga, pendekatan proyek. Keempat, pendekatan kerjasama. Kelima, pendekatan partisipatif. Keenam, pendekatan pelatihan dan kunjungan. Ketujuh,

pendekatan lembaga pendidikan, dan Kedelapan, pendekatan pembangunan sistem usaha tani.

Noor (2011:91) mengemukakan bahwa kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kartasmita dalam Tampubolon dkk (2006:11) menyebutkan pemberdayaan mempunyai dua arah, yaitu: (a) upaya melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, (b) memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dari beberapa pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi berdaya secara ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada, desa memiliki kedudukan yang lebih berdaulat dan bertanggung jawab untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government Driven Development atau Community Driven Development, sekarang bersistem Village Driven Development (Silahudin, 2015:9). Artinya, bahwa saat ini desa ditempatkan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat. Dalam konteks ini desa memiliki hak otonomi yang kuat dalam melaksanakan program-program yang berbasis desa dengan bersandar pada partisipasi warga masyarakat desa.

Setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa disebutkan bahwa desa berhak untuk mendirikan badan usaha lembaga milik desa yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi desa sehingga pemerintah desa bersama masyarakat bisa membangun perekonomian desa sesuai dengan potensi yang dimiliki. BUMDES saat ini menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diyakini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kemandirian dalam berusaha dan menciptakan peluang. Logika pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Potensi desa yang sudah diketahui akan dapat dikembangkan dengan mudah salah satunya memasarkan produk atau jasa yang menjadi unggulan melalui BUMDES. Gunawan dalam Agunggunanto dkk (2016:67) menjelaskan bahwa pembentukan BUMDES bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Ollanrewaju & Chukwudi dalam Darwita dan Redana (2018:57) menyatakan bahwa BUMDES ini tidak hanya mementingkan hasil yang akan dicapai melainkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya juga “community development, human resources development, technology transfer and self-reliance, economic development and behavioral changes”.

Maryunani dalam Trisnawati dan Indrajaya (2017:1107) memiliki pendapat bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan dibantu oleh pemerintah desa yang mempunyai tujuan yaitu dapat memperkuat perekonomian

yang ada di desa dan dapat membangun kerekatan sosial di masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan desa dan potensi yang berada di desa. BUMDES sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial (Adawiyah, 2018:1).

Desa Wisata Lerep merupakan salah satu desa yang sudah memiliki BUMDES sebagai unit pembangunan ekonomi. BUMDES yang diberi nama Gerbang Lentera ini didirikan di tahun 2016 dan mulai resmi beroperasi sejak tahun 2017. Desa ini terkenal sebagai desa wisata yang cukup terkenal karena memiliki berbagai jenis wisata mulai dari wisata air, wisata darat, serta wisata edukasi untuk anak usia sekolah. BUMDES Gerbang Lentera didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya memuat tentang pendirian BUMDES. Desa Wisata saat ini tengah menjadi tren di masyarakat Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan datangnya turis baik dari lokal maupun mancanegara. Selain itu, secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

However, a relatively unexplored theme in previous studies is that tourism's potential benefits to rural communities are affected by rural development policies and practices: specifically, a fair and effective collaborative governance approach. (Saarinen, *Journal of Travel Research* 2018, Vol. 57(4) 483 –494)

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata menerangkan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak

menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan (Peraturan Desa Nita Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Desa Wisata). Mustangin dkk (2017:64) mengatakan bahwa Desa Wisata adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat petani dalam rangka meningkatkan pendapatan pertaniannya. Sedangkan, mengutip pendapat Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Jurnal Farizi Ramadhan dan Parfi Khadiyanto yang berjudul *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata di Desa Wisata Bejiharjo, Gunugkidul, Yogyakarta*, yang dimaksud dengan desa wisata adalah: "Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial, ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tat ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya".

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi (Wuri dkk, 2015:143). Pertumbuhan pariwisata di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya zaman. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang keuntungan bagi Indonesia dalam menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. BUMDES menjadi salah satu lembaga yang berfungsi menaungi sektor ekonomi desa berdasarkan potensi desa termasuk Desa Wisata Lerep. Damanik dalam Andriyani (2017:2) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh

ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Soekadjo dalam Sidiq (2017:322) mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan perusahaan pariwisata yang mencakup objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, serta usaha-usaha lainnya.

Dalam melakukan pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES, hal terpenting dalam suatu program pemberdayaan tersebut adalah pada rangkaian prosesnya dimana proses pemberdayaan membutuhkan perencanaan dan analisis yang matang agar tujuan dapat tercapai. Untuk itulah dalam sebuah proses pemberdayaan umumnya meliputi 3 aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sasaran pemberdayaan ditujukan agar meningkatkan kinerja yang nyata sesuai dengan keterampilan yang ada sehingga diperoleh perbaikan dalam produktifitas dan pendapatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Studi internasional dalam penelitian proses pemberdayaan yang dikemukakan oleh Keiffer (dalam Lord dan Hutchison 1993:3-4) sebagai berikut:

work on personal empowerment is one of the only major empirical studies which examines personal empowerment as a process. He labels empowerment as a developmental process which includes four stages: entry, advancement, incorporation, and commitment. The entry stage appears to be motivated by the participant's experience of some event or condition threatening to the self or family, what Keiffer refers to as an act of 'provocation'. In the advancement stage, there are three major aspects which are important to continuing the empowerment process: a mentoring relationship; supportive peer relationships with a collective organization; and the development of a more critical understanding of social and political

relations. The central focus of the third stage appears to be the development of a growing political consciousness. Commitment is the final stage - one in which the participants apply the new participatory competence to ever expanding areas of their lives.

Artinya: pemberdayaan adalah satu-satunya yang utama studi empiris meneliti pemberdayaan sebagai suatu proses. Peneliti memberi label pemberdayaan sebagai proses meliputi empat tahap: masukan, kemajuan, penggabungan, dan komitmen. Tahap entri tampaknya dimotivasi oleh pengalaman peserta dari beberapa peristiwa atau kondisi yang mengancam diri atau keluarga, apa yang Keiffer sebut sebagai tindakan 'provokasi'. Di tahap kemajuan, ada tiga aspek utama yang penting untuk melanjutkan proses pemberdayaan: pendampingan hubungan; hubungan rekan yang mendukung dengan organisasi kolektif; dan pengembangan pemahaman yang lebih kritis tentang hubungan sosial dan politik. Pusat fokus tahap ketiga tampaknya adalah pengembangan kesadaran politik yang berkembang. Komitmen adalah tahap terakhir - satu di mana para peserta menerapkankompetensi partisipatif baru untuk memperluas bidang kehidupan mereka.

Namun, tidak jarang pula pemberdayaan yang mengalami kegagalan atau berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam misalnya dilihat dari kapasitas fasilitator sebagai agen pemberdaya yang terkadang dianggap tidak konsisten. Dalam mengajak masyarakat sasaran, cara mengajak dengan sitem paksaan tentu tidak akan efektif. Hal ini memberikan stigma bahwa agen pemberdayalah yang membutuhkan masyarakat sasaran bukan lagi masyarakat yang membutuhkan agen pemberdayaan. Pemberdayaan tidak hanya bermodal pada bantuan dana saja melainkan juga apek kemauan dan niat masyarakat sebagai subjek yang ingin diberdayakan. Sedangkan faktor dari luar, masih banyak masyarakat sasaran yang kurang patuh akan proses dan niat pendampingan dari agen pemberdayaan. Maka dalam proses pemberdayaan, perlu adanya jalinan komunikasi antara agen pemberdayaan

dengan masyarakat sasaran untuk membuat mereka tertarik untuk berpartisipasi. Saat komunikasi sudah terjalin, barulah agen pemberdayaan bisa mendorong masyarakat untuk bisa berfikir dan menghasilkan informasi bagi semua sebelum benar-benar menyusun rencana aksi.

Sebagian masyarakat yang mengikuti pemberdayaan biasanya tertarik untuk berpartisipasi karena adanya iming-iming bantuan modal. Model masyarakat sasaran yang seperti ini biasanya yang tidak akan bisa menjadi masyarakat mandiri karena akan selalu ditopang oleh modal pemerintah. Peran fasilitator sebaiknya mendorong masyarakat sasaran untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan termasuk dalam alokasi anggaran sehingga masyarakat juga akan memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kepemilikan yang tinggi. Hal ini tentu saja tidak hanya dialami oleh BUMDES di Desa Wisata Lerep, tetapi juga banyak terjadi di BUMDES lainnya. Bahkan beberapa BUMDES yang berdiri sudah tidak bisa beroperasi lantaran tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada. Alasan yang paling mendasar dari BUMDES yang tidak berjalan ialah tidak berfungsinya BUMDES sebagai wadah untuk menaungi kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. BUMDES yang hanya asal berjalan tanpa mempertimbangkan potensi atau kemampuan desa akan sulit mengembangkan lembaga ekonomi tersebut.

Menurut Widiasih dan Suminar (2015:90) indikator keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, serta kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan pencapaian tujuan melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat untuk proses. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan menurut Sumodiningrat (1999:138) mencakup hal-hal seperti: 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin, 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia, 3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya, 4) Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat, dan 5) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan penggambaran tentang proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa di Desa Wisata Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu dua bulan dengan cukup waktu mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan yang diteliti.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 2 pengelola BUMDES sebagai informan kunci, 2 ketua unit usaha dan 2 masyarakat yang diberdayakan sebagai informan tambahan. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diambil dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang meliputi proses kegiatan pemberdayaan dari tahap persiapan sampai terminasi. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk

melengkapi data yang tidak bisa diungkap melalui teknik observasi. Peneliti memberi pertanyaan secara langsung kepada pengelola BUMDES, ketua unit BUMDES dan anggota BUMDES yang menjadi sasaran pemberdayaan yang pada dasarnya mengacu pada fokus permasalahan mengenai proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui BUMDES di Desa Wisata Lerep dan juga mendeskripsikan faktor yang mempengaruhinya baik faktor yang mendorong maupun yang menghambat pemberdayaan. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang berupa arsip-arsip, foto kegiatan saat diadakan pertemuan rutin, pelatihan, dan referensi yang lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari berbagai sumber yaitu subyek maupun informan tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa di Desa Wisata Lerep. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi fisik daerah penelitian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa di Desa Wisata Lerep. Serta metode dokumentasi yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pemilihan triangulasi sumber dipilih karena penulis memperoleh banyak data melalui wawancara, sehingga keabsahan data dari keterangan yang telah diperoleh dari informan kunci perlu diuji ulang atau dibandingkan dengan keterangan yang diberikan informan tambahan. Sedangkan teknik triangulasi metode dipilih karena menggabungkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDES di Desa Wisata Lerep diresmikan pada tanggal 1 Maret 2017. Hadirnya lembaga BUMDES di Desa Wisata Lerep bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat menjadi mandiri dan

kreatif dalam menciptakan peluang usaha. Pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES di Desa Wisata Lerep merupakan upaya pemberdayaan di bidang ekonomi yang tujuannya untuk memberikan kemampuan, keterampilan, keberdayaan atau kemandirian dan sebagainya kepada masyarakat desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup melalui BUMDES. Lembaga BUMDES difungsikan untuk menggerakkan ekonomi desa dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki baik potensi alamnya maupun sumber daya manusianya. Secara bertahap, BUMDES memberdayakan masyarakat melalui 7 bidang usaha yang digeluti yaitu usaha simpan pinjam, katering, pariwisata, persewaan, toserba, serta perikana dan perkebunan. Semua bidang yang ada dikepalai oleh seorang ketua unit usaha yang telah dibentuk melalui rapat bersama. Masyarakat bebas mengikuti program pemberdayaan yang ada berdasarkan minat dan kebutuhan. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam proses pemberdayaan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap yang paling akhir yaitu tahap terminasi, dimana terjadinya suatu keputusan hubungan antara agen pemberdayaan dengan masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan yang dilakukan di Desa Wisata Lerep bertujuan untuk memberikan keterampilan/pelatihan kepada masyarakat sasaran sehingga mampu menjadi masyarakat yang mampu belajar dan berusaha meningkatkan kesejahteraan melalui program BUMDES yang ada disana. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan (Widjajanti, 2011:16).

Harahap (2012:79) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan

pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Suryana dkk (2014:243) menjelaskan bahwa dengan adanya Bumdes maka produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok wanita akan pasti terjual dengan harga standar. Hal ini akan membangkitkan motivasi kelompok untuk memproduksi dan bersaing secara sehat dalam hal keberlanjutan produk dan mutu produk.

Dari hasil peneliti melakukan penelitian terhadap subjek-subjek yang terlibat dalam pemberdayaan melalui badan usaha milik desa di Desa Wisata Lerep, maka peneliti menemukan penelitian sebagai berikut:

1. Proses pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES

Dalam proses pemberdayaan, ada tujuh tahapan yang seharusnya dilewati dalam program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana di Desa Wisata Lerep, tahap yang dilakukan dalam proses pemberdayaan menurut Adi (2013:179) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini ada dua tahap yang harus dikerjakan, yaitu penyiapan petugas (tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*) dan penyimpanan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Menurut Novitasari dan Sugito (2018:99) dalam penelitian *Journal of Non Formal Education* mengartikan tahap perencanaan sebagai berikut:

The planning stage was the important stage as the basis for the implementation of the action. The planning of the training was done by involving the trainees in identifying learning needs together, determining the training schedule, determining the venue of the training, and determining the learning media and method.

Artinya: Tahap perencanaan adalah yang terpenting sebagai dasar untuk implementasi tindakan. Perencanaan pelatihan itu dilakukan dengan melibatkan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan

belajar bersama, menentukan jadwal pelatihan, menentukan tempat pelatihan, dan menentukan pembelajaran media dan metode.

Burhanudin Ay (2008:47) menjelaskan bahwa perencanaan program merupakan upaya perumusan masalah, pengembangan, pelaksanaan program suatu proses yang berkelanjutan, melalui semua warga masyarakat, penyuluh, dan para ilmuwan memusatkan pengetahuan dan keputusan-keputusan yang bijaksana dan matang.

Di Desa Wisata Lerep yang melakukan pemberdayaan adalah lembaga BUMDES Gerbang Lentera melalui 7 program unit usaha yang ada yang bekerjasama dengan pemerintah desa dan dinas jika memang dibutuhkan. Persiapan yang dilakukan adalah dengan menentukan siapa yang akan menjadi sasaran pemberdayaan untuk selanjutnya diberdayakan. Setelah itu menentukan tempat dan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pemberdayaan atau pelatihan apakah memerlukan izin atau tidak. Selain menjalin hubungan dengan pemerintah desa, penting juga untuk mengadakan hubungan dengan para tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat yang ada di desa untuk saling bersinergi mengubah wajah Desa Lerep menjadi Desa Wisata yang berprestasi.

b. Tahap Pengkajian (Assesment)

Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilihat secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Pada tahap ini, agen pemberdaya bersama dengan masyarakat sasaran mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya identifikasi maka akan memudahkan dalam melakukan program karena hal yang akan dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat sehingga akan menimbulkan semangat yang tinggi dalam berusaha.

Dengan kekuatan potensi alam yang dijadikan objek wisata, maka program yang diambil adalah program yang dapat menunjang objek wisata yang ada di Desa Wisata Lerep

seperti pengadaan katering dan jasa pariwisata. Selain mengidentifikasi potensi, dalam identifikasi ini juga berfungsi untuk menggambarkan hambatan-hambatan yang mungkin akan dilewati ketika melaksanakan program pemberdayaan. Teknik analisis yang biasa digunakan biasanya adalah melalui teknik analisis swot.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahap ini petugas sebagai agen perubahan (agen of change) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, agen pemberdaya dan masyarakat sasaran menentukan solusi dari masalah yang dihadapi. Sehingga nantinya akan memunculkan sebuah program yang dapat menjadi pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

d. Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan, menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Conyers dalam jurnal yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat dan Keterkaitan Dengan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat" mengemukakan bahwa:

"bahwa pada tahap ini tak jarang pelaku perubahan dibutuhkan oleh masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis terutama dalam hal pembuatan proposal ke pihak penyandang dana". (Adi, 2013:65).

Disini, apabila agen pemberdayaan membutuhkan dana untuk kegiatan pemberdayaan maka dapat membuat dan mengajukan proposal kepada pemerintah desa sesuai dengan anggaran kebutuhan. Pengajuan proposal pun tidak hanya sampai pada

pemerintah desa juga tetapi juga instansi lain yang dapat menjadi mitra usaha. Mengingat anggaran dana dari pemerintah desa masih sangat minim sehingga kurang bisa mengembangkan unit usaha yang ada menjadi cukup pesat.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Kurniawati dkk (2015:12) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program merupakan sebuah proses untuk mengoperasikan program-program yang telah disusun agar menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan program pemberdayaan yang akan dikaji di Desa Wisata Lerep adalah program-program usaha milik BUMDES yaitu bidang simpan pinjam, pariwisata, katering, persewaan, toserba, dan perikanan serta peternakan. Semua unit usaha ini saling terkait satu sama lain dan masing-masing unit usaha memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan pelaksanaan pemberdayaan. Program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai desa wisata melalui program yang ada di BUMDES dapat membantu masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya baik secara ekonomi maupun secara sosial. Selain menambah penghasilan desa dan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat juga semakin meningkat dan menimbulkan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan karena merasa saling memiliki aset desa yang ada. Infrastruktur Desa Wisata Lerep dibuat semenarik mungkin untuk menarik setiap orang yang masuk ke kawasan Desa Wisata Lerep. Hal ini tentunya berkat kerjasama masyarakat yang berperan aktif membantu pemerintah desa dalam mengubah Desa Wisata Lerep. Keuntungan pun didapatkan oleh banyak pihak karena hasil dari program

pemberdayaan sebagian digunakan untuk perbaikan jalan yang masih perlu diperbaiki. Pertemuan rutin untuk program pemberdayaan masyarakat sendiri berbeda-beda tergantung pada unit usaha yang diikuti karena setiap unit usaha memiliki kebijakan tersendiri.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk kontrol dan mengukur sejauh mana program berhasil diselenggarakan. Evaluasi di dalam pemberdayaan ekonomi ini juga melibatkan masyarakat umum. Tujuannya adalah supaya sama-sama saling mengetahui hasil yang telah dicapai dan yang belum tercapai serta pemecahan masalah agar dilain waktu kejadian tidak akan terulang kembali. Hal ini juga bertujuan untuk membina hubungan yang baik dengan masyarakat agar masyarakat merasa dibutuhkan dan dirasakan kehadirannya. Seringkali program-program pemberdayaan mengalami kegagalan karena peran masyarakat yang dianggap tidak begitu penting dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Masyarakat hanya dijadikan bahan untuk subjek saja sehingga tak jarang banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa setelah mengikuti pemberdayaan. Evaluasi dilakukan di unit masing-masing dan juga ada laporan pertanggung jawaban di akhir tahun bersama pemerintah desa.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Pemberdayaan dihentikan apabila yang mengadakan pelatihan berasal dari dinas namun karena BUMDES Gerbang Lentera aktif dalam mengembangkan unit usahanya, pemberdayaan masih dilakukan secara aktif melalui unit-unit usaha yang ada.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Wisata Lerep dengan melewati tujuh tahapan yang telah diuraikan diatas dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Walaupun belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa, namun dapat dirasakan oleh individu yang terlibat dalam pemberdayaan. Bidang pariwisata dan catering menjadi penyumbang terbesar dengan adanya

peningkatan pendapatan dari tahun ketahun. Banyaknya jumlah wisatawan pun berasal dari berbagai macam daerah dan bisa dari segala jensi umur karena tidak hanya wisata alam saja yang disediakan, tetapi juga ada wisata budaya dan wisata edukasi bagi anak-anak usia sekolah. Wisata edukasi yang diadakan misalnya adalah penanaman cabai, pembuatan permen susu, sabun susu, pengolahan limbah menjadi barang bernilai guna dan masih banyak lainnya. Untuk hiburan, tamu biasa disambut dengan iringan musik angklung dan tarian dari penari sehingga wisatawan akan merasa terhibur. Wisata budaya juag menampilkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Desa Wisata Lerep seperti iriban yaitu penyajian makanan beramai-ramai.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES

Dalam proses pemberdayaan ekonomi melalui BUMDES di Desa wisata Lerep, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung pemberdayaan

Faktor pendukung merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu, maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1) Faktor pendukung yang berasal dari dalam (internal)

Faktor pendukung yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dan semangat individu dalam berusaha. Faktor ini turut menentukan keberhasilan penacapaian hasil. Niat yang kuat akan membuat individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pemberdayaan dari awal hingga akhir.

2) Faktor pendorong dari luar (eksternal)

Faktor pendukung yang berasal dari luar antara lain:

a) Potensi sumber daya alam yang tersedia

Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Desa Lerep sebagai desa wisata. Potensi alam

yang lumayan banyak menjadikan Desa Lerep mudah menentukan jenis pemberdayaan apa yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

b) Dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa

Tidak dipungkiri bahwa dukungan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu kelancaran pemberdayaan. Adanya dukungan memudahkan dalam menjalin kerjasama dan menekan timbulnya konflik yang mungkin disebabkan akibat perbedaan pendapat.

b. Faktor penghambat pemberdayaan

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Menurut Nasdian (dalam Malik 2014:133) kendala pemberdayaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik. Menurut Adamson dalam Jurnal Internasional mengatakan bahwa:

One of the key barriers to empowerment is the level of community capacity, a term used to designate the abilities of community members to engage effectively in partnership activities.

Yang berarti bahwa: Salah satu hambatan utama untuk pemberdayaan adalah tingkat kapasitas masyarakat, istilah yang digunakan untuk menunjuk kemampuan anggota masyarakat untuk terlibat secara efektif dalam kegiatan kemitraan.

Faktor penghambat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1) Faktor penghambat dari dalam (internal)

Faktor penghambat yang berasal dari dalam yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengerti manajemen BUMDES. Pengelola BUMDES saat ini hanya berkisar 9-11 orang dan banyak yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMDES. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik.

2) Faktor penghambat dari luar (eksternal)

Faktor penghambat yang berasal dari luar antara lain

a) Minimnya anggaran dana yang disediakan

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah desa untuk program pemberdayaan BUMDES masih dirasakan kurang karena BUMDES sendiri memiliki 7 unit usaha yang berjalan aktif dan masing-masing memiliki tugas masing-masing. Anggaran yang sedikit dan harus dibagi lagi mengakibatkan unit usaha tidak bisa mengembangkan usahanya secara pesat. Belum lagi masalah akses jalan yang belum baik seluruhnya dan harus diselesaikan agar dapat digunakan oleh wisatawan supaya dapat mengakses tempat wisata.

b) Kurang percayanya masyarakat akan peran BUMDES

Meskipun dukungan masyarakat kepada BUMDES sudah cukup baik namun masyarakat masih belum sepenuhnya percaya untuk menitipkan hasil produksi atau olahan yang dihasilkan di toserba milik BUMDES. Kebanyakan masyarakat masih senang untuk memasarkan produk yang dihasilkan sendiri padahal BUMDES bisa menciptakan label yang lebih menjual nilai dari harga produk. Selain itu, produk juga bisa dipasarkan melalui pameran-pameran atau festival desa wisata yang biasanya diadakan setiap tahunnya.

SIMPULAN

Proses pemberdayaan harus melewati 7 tahap pemberdayaan, yaitu: Tahap Persiapan, Tahap Pengkajian (Assesment), Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, Tahap Performalisasi Rencana Aksi, Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan, Tahap Evaluasi, dan Tahap Terminasi.

Faktor pendorong terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendorong dari dalam (internal) dan faktor pendorong dari luar (eksternal). Faktor pendorong yang berasal dari dalam (internal) yaitu niat dan semangat dari individu dalam berusaha. Niat dan semangat itulah yang dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Sedangkan faktor pendorong dari luar (eksternal) yaitu potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah Desa Wisata Lerep yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan adanya dukungan dari

masyarakat dan pemerintah desa dalam setiap pengadaan program-program pemberdayaan yang ada.

Sedangkan faktor menghambat juga dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu faktor penghambat dari dalam (internal) dan juga faktor penghambat dari luar (eksternal). Faktor penghambat yang berasal dari dalam (internal) yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengetahui pemahaman mengenai manajemen BUMDES sehingga pengelola banyak yang merangkap jabatan. Hal ini menyebabkan pengelola yang merangkap jabatan harus pintar dalam memajemen dirinya dalam memegang jabatan. Faktor penghambat yang berasal dari luar (eksternal) yaitu minimnya anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah desa yang diakibatkan oleh pembagian ke dalam unit-unit usaha BUMDES yang ada di Desa Wisata Lerep. Anggaran dana yang sedikit membuat perkembangan pemberdayaan akan sulit untuk berkembang maju. Selain itu, masyarakat masih kurang percaya akan arti penting BUMDES ditandai dengan bahwa masih sedikit masyarakat yang mau menitipkan hasil olahan atau produk yang dihasilkan di toserba BUMDES. Kurangnya sosialisasi dan penjalinan dengan mitra usaha dari luar mungkin menjadi salah satu faktor penyebab mengapa hal ini bisa terjadi.

Untuk kedepannya, pengelola BUMDES sebaiknya selalu menjalin hubungan dengan masyarakat dan pemerintah desa dengan baik sehingga dapat meminimalisir adanya perbedaan pendapat yang mungkin ditimbulkan. Pemerintah desa juga sebagai penyedia aspirasi dari masyarakat berfungsi untuk memantau, melindungi, dan mengayomi setiap program-program pemberdayaan yang diselenggarakan di desa karena tujuan pemberdayaan sendiri adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dan untuk masyarakat sasaran sendiri diharapkan dapat menjaga niat dan semangat dalam berusaha menuju masyarakat yang mandiri sehingga kesejahteraan hidup dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, D., & Bromiley, R. (2013). Community empowerment: learning from practice in community regeneration. *International Journal of Public Sector Management*, 26(3), 190-202.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan Desa mandiri melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Ani, F., Ramlan, N., Suhaimy, K. A. M., Jaes, L., Damin, Z. A., Halim, H., ... & Ahmad, S. (2018, January). Applying empowerment approach in community development. In *Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS)* (Vol. 1, No. 1).
- Burhanudin, A. Y. (2008). Perencanaan Program Pemberdayaan Menuju Perubahan dalam Masyarakat. *Jurnal Paradigma*. Vol, 5(1), 47-62.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1).
- Desmawati, L., Rifai, A., & Mulyono, S. E. (2015). PENANGGULANGAN MASYARAKAT MISKIN KOTA RAWAN KRIMINALITAS MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL DI KOTA SEMARANG. *Journal of Nonformal Education*, 1(1).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: the politics of alternative development*. Blackwell.
- Gutiérrez, J. (2001). Location, economic potential and daily accessibility: an analysis of the accessibility impact of the high-speed line Madrid-Barcelona-French border. *Journal of transport geography*, 9(4), 229-242.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2), 78-96.
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2).

- Kurniawati, D. P. (2013). Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi (studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 9-14.
- Kusniawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata di Desa Bumiaji. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 2(1), 59-72.
- Lord, J., & Hutchison, P. (2009). The process of empowerment: Implications for theory and practice. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 12(1), 5-22.
- Malik, A., & Dwiningrum, S. I. A. (2014). Keberhasilan program desa vokasi terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Gemawang Kabupaten Semarang. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 1(2), 124-135.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS*, 1(2/Julii).
- Novitasari, D., & Sugito, S. (2018). Improving the skill of early childhood education teachers in making lesson plans through an andragogy-based training. *Journal of Nonformal Education*, 4(1), 97-106.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Qodriyati, T. U., & Fakhruddin, F. (2016). KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMLOKO KABUPATEN GROBOGAN. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1).
- Ramadhan, F., & Khadiyanto, P. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata di Desa Wisata Bejiharjo, Gunungkidul, YOGYAKARTA. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4), 949-963.
- Saarinen, J. (2007). Contradictions of rural tourism initiatives in rural development contexts: Finnish rural tourism strategy case study. *Current Issues in Tourism*, 10(1), 96-105.
- Sidiq, S., & Prihatmaji, Y. P. (2017). KKN-PPM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLINGO, KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(2), 378-385.
- Silahudin, M. 2015. *Buku 1: Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryana, I. M., Setiyono, T. J., & Murdoyono, C. S. (2015). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)*, 4(2).
- Tampubolon, J., Sugihen, B. G., Samet, M., Susanto, D., & Sumardjo, S. (2006). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN KELOMPOK (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Penyuluhan*, 2(2).
- Trisnawati, A. P., & Putu, N. Indrajaya, I Gusti Bagus. 2017. Peranan BUMDES Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(6).
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BATIK BREBESAN (Studi di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education*, 1(1)
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-27.
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Journal of rural and development*, 1(1).
- Wuri, J., Hardanti, Y. R., & Harnoto, L. B. (2015). DAMPAK KEBERADAAN KAMPUNG WISATA TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT. *Jurnal Penelitian*, 18(2).